

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Auditing

Jasa auditing digunakan secara meluas baik pada perusahaan swasta maupun pemerintah. Alasan ekonomi yang mendorong diperlukannya auditing di latar belakang pada kondisi masyarakat yang semakin kompleks dan menghindari ketidakakuratan suatu laporan.

2.1.1 Pengertian Auditing

Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, tidak memihak, yang dikenal dengan sebutan auditor. Tujuannya adalah untuk melaksanakan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan dengan standar, regulasi, dan praktek yang telah disetujui dan diterima.

Sebagai ilmu pengetahuan, definisi auditing sendiri telah dirumuskan oleh beberapa ahli diantaranya menurut Boynton (2003:5) yang diterjemahkan oleh Paul A. Rajoe, adalah :

"Suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan".

Sebagaimana dikemukakan oleh Sukrisno Agus (2008;3) menyatakan bahwa:

"Auditing adalah suatu pemeriksaan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut".

Adapun pengertian audit menurut Mulyadi (2002;9) menyatakan bahwa;

"Secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan,serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan".

Sedangkan pengertian auditing menurut Ely dan Siti (2010;14) menyatakan bahwa;

"Auditing adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta melaporkan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan, dimana auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen".

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa audit (pemeriksaan) merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tersebut untuk menilai dan melaporkan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan, kepada pihak yang bersangkutan, dan audit dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Maka audit memiliki unsur dan karakteristik penting, yaitu;

1. Audit suatu proses sistematis, untuk pengumpulan dan pengevaluasian bukti atau informasi secara objektif.
2. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi untuk menetapkan tingkat kesesuaian informasi.
3. Adanya kriteria yang telah ditetapkan
4. Adanya pelaporan dan penyampaian hasil kepada pemakai yang berkepentingan.

2.1.2 Standar Audit

Arens (2008:42) menyatakan bahwa standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti Kompetensi dan Independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti. (dalam Hanny dkk, 2011).

Menurut (SPAP:2001:150:1) standar auditing terdiri dari :

1) Standar Umum

a. Keahlian dan pelatihan teknis yang memadai

Auditor harus memiliki latar belakang pendidikan formal bidang auditing dan bidang akuntansi

b. Sikap mental independen

Independensi artinya tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

c. Kemahiran professional dengan cermat dan seksama

Penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama menekankan tanggung jawab setiap professional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

2) Standar Pekerjaan Lapangan

a. Perencanaan dan supervise audit

I. Perencanaan

Merupakan rancangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang di harapkan, yang meliputi penentuan:

1. Sifat, luas, dan saat pelaksanaan audit

Prosedur yang dapat di pertimbangkan oleh auditor daalm perencanaan dan supervise biasanya mencakup review terhadap catatan auditor yang berkaitan dengan entitas dan pembahasan dengan porseni lain dalam kantor akuntan dan personel entitas prosedur tersebut.

2. Program Audit

Dalam perencanaan audit auditor juga harus membuat suatu program audit secara tertulis untuk setiap audit.

II. Supervise

Mencakup pengaruh usaha asisten dalam mencapai tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai.

b. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern

Auditor harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern yang memadai untuk merencanakan audit, penentuan sifat, saat dan ruang lingkup pengujian dengan melaksanakan prosedur untuk memahami desain pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan, dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan

c. Bukti audit kompeten yang cukup

Bukti audit yang kompeten yang cukup harus di peroleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

3) Standar Pelaporan

a. Pernyataan tentang kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia

b. Pernyataan mengenai ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum

laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi daalm penyusunan laporan keuangan periode berjalan di dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut daalm periode sebelumnya.

c. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan

pengungkapan informative dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan laporan auditor

d. Pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan

laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau secara asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat di berikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat di berikan maka alasannya harus dinyatakan.dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang di pikul oleh auditor.

2.1.3 Tahap-Tahap Audit atas Laporan Keuangan

Prosedur pelaksanaan audit laporan keuangan menurut Mulyadi (2002: 121-123), dibagi menjadi empat tahap:

1. Penerimaan perikatan audit

Dalam perikatan audit, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor, dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Langkah awal pekerjaan audit laporan keuangan berupa pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perikatan audit dari calon klien atau untuk melanjutkan atau menghentikan perikatan audit dari klien berulang. Tahap penerimaan perikatan audit yang dilakukan auditor

menempuh suatu proses yang meliputi evaluasi integritas manajemen, identifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa, menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit, menilai independensi, menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan keseksamaan, serta membuat surat perikatan audit.

2. Perencanaan Audit

Keberhasilan penyelesaian perikatan audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat auditor. Dalam perencanaan audit, seorang auditor dituntut untuk memahami bisnis dan industri klien, dan memahami pengendalian intern klien.

3. Pelaksanaan Pengujian Audit

Tahap pelaksanaan pengujian audit ini juga disebut dengan pekerjaan lapangan. Tujuan utama pelaksanaan pengujian audit adalah untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas pengendalian intern klien dan kewajaran laporan keuangan klien. Dalam tahap ini, langkah awal yang dilakukan auditor adalah membuat program audit yang digunakan untuk pengujian pengujian pengendalian intern klien dan menilai kewajaran laporan keuangan klien. Setelah program audit selesai dilaksanakan, auditor melakukan evaluasi dan menilai hasil dari pelaksanaan program audit tersebut yang dituangkan dalam kertas kerja.

4. Pelaporan Audit

Dalam tahap akhir pekerjaan audit atas laporan keuangan berupa pelaporan audit, terdapat dua tahap penting : (1) Menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik simpulan, (2) menerbitkan laporan audit. Dari hasil tahap pelaksanaan pengujian audit yang berupa kertas kerja tersebut, auditor menarik simpulan secara menyeluruh dan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan audit. Proses ini sangat subyektif sifatnya, yang sangat tergantung pada pertimbangan profesional auditor.

2.1.4 Prosedur Audit

Menurut Boynton (2002:238) prosedur audit adalah metode dan teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten. Berikut ini adalah sepuluh jenis prosedur audit yang digunakan:

1. Prosedur analitis (analytical procedurs)

Prosedur ini terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan di antara data. Prosedur ini meliputi perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana, analisis vertikal atau laporan persentase, perbandingan jumlah yang sebenarnya dengan data historis atau anggaran, serta penggunaan model matematis dan statistik, seperti analisis regresi.

2. Inspeksi (inspecting)

Prosedur ini meliputi pemeriksaan rinci terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumberdaya berwujud. Prosedur ini digunakan secara

luas dalam auditing terutama dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti untuk menentukan ketetapan persyaratan dalam faktur atau kontrak yang memerlukan pengujian.

3. Konfirmasi (confirming)

Prosedur ini adalah bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi klien.

4. Permintaan keterangan (inquiring)

Prosedur ini meliputi permintaan keterangan secara lisan atau tertulis oleh auditor. Permintaan keterangan tersebut biasanya ditujukan kepada manajemen atau karyawan, umumnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah dilaksanakannya prosedur analitis atau permintaan keterangan yang berkaitan dengan keuangan persediaan atau piutang yang dapat ditagih.

5. Penghitungan (counting)

Dua aplikasi yang paling umum dari perhitungan adalah perhitungan fisik sumberdaya berwujud seperti jumlah kas dan persediaan yang ada dan yang kedua yaitu akuntansi seluruh dokumen dengan nomor urut yang telah dicetak.

6. Penelusuran (tracing)

Pada prosedur ini auditor memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan, dan menentukan bahwa informasi yang

diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi.

7. Pemeriksaan bukti pendukung (vouching)

Prosedur ini meliputi pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi, dan mendapatkan serta memeriksa dokumentasi yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi.

8. Pengamatan (observing)

Prosedur ini berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses yang dapat berupa pemrosesan rutin jenis transaksi tertentu seperti penerimaan kas, untuk melihat penerapan kebijakan dan prosedur perusahaan.

9. Pelaksanaan ulang (reperforming)

Prosedur ini adalah perhitungan dan rekonsiliasi yang dibuat oleh klien. Misalnya menghitung ulang total jurnal, beban penyusutan, bunga akrual diskon atau premi obligasi, perhitungan kuantitas dikalikan harga per unit pada lembar ikhtisar persediaan serta total pada skedul pendukung dan rekonsiliasi.

10. Teknik audit berbantuan computer (computer-assisted audit techniques)

Apabila catatan akuntansi klien dilaksanakan melalui media elektronik, maka auditor dapat menggunakan teknik audit berbantuan computer untuk membantu melaksanakan beberapa prosedur yang telah diuraikan sebelumnya.

2.1.5 Manfaat Audit

Manfaat suatu audit menurut Kingston Smith LLP dari artikel di websitenya yang berjudul Benefits of Audit (2012) adalah sebagai berikut:

1. Mendeteksi kelemahan-kelemahan dalam sistem akuntansi dan memungkinkan untuk memberikan saran-saran dalam meningkatkan sistem yang sudah ada.
2. Meyakinkan para direktur untuk tidak ikut campur dalam fungsi-fungsi harian akuntansi supaya bisnis-bisnis yang sudah ada berjalan dengan informasi yang diterima, dan membantu dalam mengurangi penipuan dan akuntansi yang kurang memadai.
3. Memberikan saran yang dapat memberikan keuntungan finansial untuk bisnis, termasuk bagaimana bisnis tersebut dapat berjalan, keuntungan yang dapat diharapkan, dan bagaimana hal-hal tersebut dapat dicapai.
4. Meningkatkan kepercayaan bagi informasi-informasi yang dipublikasikan untuk para karyawan, pelanggan, pemasok, pemodal, dan petugas pajak.
5. Memberikan jaminan kepada para pemegang saham bahwa angka-angka dalam rekening adalah true dan fair view.

2.1.6 Tujuan Audit

Tujuan audit dapat bersifat umum, bisa juga khusus. Tujuan audit diupayakan tercapai dalam semua penugasan dan dituntun oleh lingkup audit yang diberikan manajemen dan dewan komisaris ke kepala bagian audit. Misalnya, auditor mungkin dibatasi hanya untuk menentukan keandalan dan keuangan. Dalam

hal ini tujuan umum audit diarahkan untuk menentukan keandalan dan integritas informasi keuangan; ketaatan dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan regulasi dan pengamanan aktiva. Dibawah ini menurut Mulyadi, menjelaskan antara tujuan audit yang bersifat umum dan khusus.

a. Tujuan Audit Umum

Pada dasarnya tujuan umum audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan ini, auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup. Untuk menghimpun bukti kompeten yang cukup, auditor perlu mengidentifikasi dan menyusun sejumlah tujuan audit spesifik untuk setiap akun laporan keuangan. Dengan melihat tujuan audit spesifik tersebut, auditor akan dapat mengidentifikasi bukti apa yang dapat dihimpun, dan bagaimana cara menghimpun bukti tersebut.

b. Tujuan audit khusus

Tujuan audit khusus lebih diarahkan untuk pengujian terhadap pos pos yang terdapat dalam laporan keuangan yang merupakan asersi manajemen.

2.2 Pengujian Substantif

Sebagaimana yang dikatakan Bonyton (2002:211) dalam bukunya *Modern Auditing*, Pengujian substantif adalah prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji moneter yang secara langsung mempengaruhi saldo keuangan. Auditor dapat mengandalkan pada tiga jenis pengujian substantif, antara lain:

1. Pengujian terinci atas transaksi

Pengujian substantif atas transaksi meliputi pemeriksaan dokumen pendukung dari setiap satuan transaksi yang dibukukan pada sebuah akun tertentu, misalnya melakukan pemeriksaan dokumen pendukung (vouching) untuk sisi debit akun piutang usaha terhadap ayat jurnal penjualan serta faktur pendukung penjualan. Selain itu dilakukan juga penelusuran rinci dari dokumen asli terhadap buku jurnal serta buku besar yang terkait dengan transaksi tersebut yang dapat digolongkan juga sebagai pengujian terinci atas transaksi.

2. Prosedur analitis

Meliputi penggunaan perbandingan untuk menilai kewajaran, misalnya membandingkan saldo suatu akun dengan data nonkeuangan yang terkait dengan saldo akun tersebut. Prosedur ini meliputi perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana, analisis vertikal atau laporan persentase, perbandingan jumlah yang sebenarnya dengan data historis atau anggaran, serta penggunaan model matematis dan statistik, seperti analisis regresi. Prosedur analitis mencakup perbandingan jumlah yang dicatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Ada empat tujuan penggunaan prosedur analitis yaitu : memahami bidang klien, menetapkan kemampuan kelangsungan hidup suatu satuan usaha, indikasi timbulnya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan, dan mengurangi pengujian audit yang lebih rinci.

3. Pengujian terinci atas saldo

Meliputi pemeriksaan dokumen pendukung untuk saldo akhir secara langsung, misalnya melakukan konfirmasi langsung kepada salah seorang pelanggan tentang saldo piutang usaha.

Sebagaimana di ungkapkan oleh Sukrisno Agus (2008;98)

“Substantive test adalah tes terhadap kewajaran saldo-saldo perkiraan laporan keuangan (Neraca dan Laporan Laba Rugi)”.

Adapun fungsi dari pengujian substantif berkaitan dengan kas adalah;

1. **Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kas.**

Sebelum auditor melakukan pengujian mengenai kewajaran saldo kas yang dicantumkan di neraca dan mutasinya selama tahun yang diaudit, ia harus memperoleh keyakinan mengenai ketelitian dan keandalan catatan akuntansi yang mendukung informasi saldo dan mutasi kas tersebut. Untuk itu auditor melakukan rekonsiliasi antara saldo kas yang dicantumkan di neraca dengan akun kas yang bersangkutan dia dalam buku besar dan selanjutnya ke jurnal pengeluaran kas dan penerimaan kas.

2. **Membuktikan keberadaan kas dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan kas yang dicantumkan di neraca.**

Seperti dalam audit pada umumnya, pengujian ini ditujukan untuk membuktikan apakah kas yang dicantumkan di neraca sesuai dengan kas sesungguhnya ada pada tanggal neraca tersebut. Untuk itu, auditor melakukan berbagai prosedur audit guna membuktikan; keberadaan kas

yang bersangkutan dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan kas, kelengkapan, hak kepemilikan atas kas, kewajaran dalam penyajian dan pengungkapan pada alaporan keuangan. Untuk membuktikan asersi keberadaan kas dan keterjadian transaksi yang bersangkutan dengan kas tersebut, auditor melakukan pengujian berikut ini:

- a. Pengujian analitik.
- b. Pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas.
- c. Perhitungan terhadap kas ditangan pada tanggal neraca.
- d. Rekonsiliasi catatab kas dengan rekening koran bank.
- e. Konfirmasi kas dibank.

3. Membuktikan hak kepemilikan klien atas kas yang dicantumkan di neraca.

Untuk membuktikan bahwa kas yang dicantumkan di neraca mencakup semua kas klien pada tanggal neraca dan mencakup semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas dalam tahun yang diaudit, auditor melakukan berbagai pengujian substantif.

4. Membuktikan kewajaran penilaian kas yang dicantumkan di neraca.

Untuk membuktikan hak kepemilikan klien atas kas yang dicantumkan di neraca, auditor melakukan pengujian substantif.

5. Membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan kas di neraca.

Seperti tersebut dalam prinsip akuntansi berterima umum, kas harus disajikan di neraca pada nilai kurs pada tanggal neraca. Untuk membuktikan kewajaran penentuan jumlah kas yang dicantumkan di neraca, auditor melakukan pengujian substantif.

2.3 Materialitas

Menurut Boynton (2002:200) Materialitas merupakan konsep penting yang menjadi pedoman auditor dalam penetapan lingkup pekerjaan audit untuk menemukan pengabaian ataupun salah saji secara bersama-sama berpotensi mencapai suatu jumlah yang akan mempengaruhi para pengguna laporan keuangan. Diperlukan lebih banyak bukti untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa setiap salah saji yang, misalnya ada dalam pencatatan persediaan tidak akan melampaui Rp500.00 daripada meyakini bahwa salah saji tersebut tidak melebihi Rp.1000.000. Keputusan materialitas ini akan menjadi pedoman dalam pengumpulan bukti kompeten yang cukup.

Konsep materialitas ini juga menjadi pedoman auditor ketika mengevaluasi temuan audit. Setelah para auditor mengumpulkan bukti audit, mereka harus segera menilai signifikansi temuan audit. Apabila digunakann teknik penarikan sample, auditor harus memproyeksikan salah saji yang diketahuinya dalam sample pada populasi keseluruhan. Salah saji yang diproyeksikan ini kemudian harus direvaluasi untuk menentukan apakah menurut pertimbangan auditor hal tersebut akan mempengaruhi pengguna laporan keuangan yang berkepentingan.

Dalam penerapan definisi ini, ada tiga tingkat materialitas digunakan untuk menentukan jenis pendapat yang akan diterbitkan.

a. Jumlahnya tidak Material

Apabila ada salah saji dalam laporan keuangan tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, hal tersebut dianggap sebagai tidak material.

b. Jumlahnya Material tetapi Tidak Memperburuk Laporan Keuangan secara Keseluruhan

Tingkat materialitas yang kedua terjadi apabila salah saji dalam laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan para pemakai laporan itu, tetapi laporan keuangan secara keseluruhan tetap disajikan secara wajar dan karenanya masih berguna.

c. Jumlahnya Sangat Material sehingga Kewajaran Laporan Keuangan secara Keseluruhan Diragukan

Tingkat materialitas tertinggi terjadi apabila pemakai mungkin akan membuat keputusan yang tidak benar jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan.

2.4 Opini Akuntan Publik

Laporan audit merupakan bagian penting dari proses audit karena di dalam laporan itu dijelaskan apa yang telah dilakukan oleh auditor dan kesimpulan apa yang diperoleh. Menurut Arens, Elder dan Beasley (2003:17) laporan auditor merupakan komunikasi atas temuan auditor kepada para pengguna informasi.

Sedangkan jusup (2001:57) mengemukakan definisi laporan audit sebagai berikut:

"Laporan audit adalah alat formal yang digunakan oleh auditor dalam mengkomunikasikan kesimpulan tentang laporan keuangan yang diaudit kepada pihak-pihak yang berkepentingan."

Terdapat tujuh unsur di dalam laporan audit, yaitu judul laporan, alamat laporan audit, paragraf pendahuluan (pernyataan fakta), paragraf *scope*, paragraf pendapat, nama KAP dan tanggal laporan audit.

Pada paragraf terakhir dalam laporan audit menyajikan kesimpulan auditor berdasarkan hasil dari proses audit yang dilakukan. Sehingga, seringkali seluruh laporan audit yang dinyatakan secara sederhana sebagai pendapat auditor. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan opini sebagai pendapat, pikiran pendirian. Pendapat auditor mengenai kelangsungan hidup akan dapat mempengaruhi klien menurut Mayangsari (2003:8). Opini auditor berarti pendapat auditor atas kelayakan laporan keuangan dibandingkan dengan peraturan akuntansi yang berlaku umum dan pendapat auditor juga mengenai kelangsungan hidup perusahaan klien

Auditor yang telah melaksanakan tugas *auditing* akan memberikan laporannya dalam bentuk opini. Jenis-jenis opini yang diberikan oleh auditor menurut Arens, Elder dan Beasley (2001:70) antara lain:

1. Wajar tanpa syarat

Laporan wajar tanpa syarat dikeluarkan auditor apabila kondisi-kondisi berikut terpenuhi:

- a. seluruh laporan keuangan telah lengkap diberikan,
- b. semua aspek dari SPAP telah dipatuhi dalam penugasan audit,
- c. bukti audit yang memadai telah terkumpul dan standar pelaksanaan telah dipatuhi,

- d. laporan keuangan telah disajikan sesuai standar yang berlaku umum,
- e. tidak ada situasi yang membuat auditor merasa perlu menambahkan sebuah paragraf penjas atau memodifikasi kalimat.

2. Wajar Tanpa Syarat dengan Paragraf Penjas

Suatu proses audit telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan serta laporan keuangan yang disajikan dengan wajar, tetapi auditor merasa perlu memberikan informasi tambahan. Berikut ini adalah penyebab-penyebab utama ditambahkan suatu paragraf penjas pada laporan audit:

- a. tidak adanya konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum,
- b. ketidakpastian atas kelangsungan hidup perusahaan,
- c. auditor menyetujui terjadinya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum,
- d. Penekanan pada suatu masalah,
- e. laporan yang melibatkan auditor lainnya.

3. Wajar dengan Pengecualian

Auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan memang telah disajikan dengan wajar, tetapi lingkup audit telah dibatasi secara material atau terjadi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum pada saat penyiapan laporan keuangan.

4. Tidak wajar

Pendapat tidak wajar digunakan saat auditor percaya bahwa secara material keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara tidak wajar, sehingga laporan keuangan tersebut tidak menyajikan posisi keuangan atau arus kas wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Laporan audit yang tidak memberikan pendapat diterbitkan pada saat auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan yang diauditnya telah disajikan secara wajar. Penolakan pemberian pendapat ini berbeda dengan pendapat tidak wajar, sebab penolakan pemberian pendapat terjadi saat auditor kurang memiliki pengetahuan atas penyajian laporan keuangan, sementara untuk menyatakan pendapat tidak wajar, seorang auditor harus memiliki pengetahuan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar.

2.5 Asersi Manajemen

Asersi manajemen (*management assertions*) adalah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Asersi manajemen berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (PSAK), karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Sebagian menyatakan bahwa auditing adalah perbandingan informasi (laporan keuangan) dengan kriteria yang telah ditetapkan (asersi yang ditetapkan). Asersi serupa mendasari semua komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, bebda dalam

laporan keuangan. Sesuai dengan itu, Auditign Standarts Boards (ASB) dalam SAS 31, *Evidential Matter* (AU 326.03), telah mengakui 5 kategori asersi laporan keuangan sebagai berikut:

1. Keberadaan dan keterjadian (existence or occurrence)
2. Kelengkapan (completeness)
3. Hak dan kewajiban (right and obligations)
4. Penilaian atau alokasi (valuation or allocation)
5. Penyajian dan pengungkapan (presentation and disclosure)

Lima kategori asersi ini merupakan hal penting karena dapat membantu auditor memahami jenis salah saji potensial yang dapat terjadi dalam laporan keuangan, dan dapat membantu auditor mengembangkan perencanaan audit untuk mengumpulkan bukti berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan.

2.6 Pengertian Kualitas Audit

Audit quality oleh Kane dan Velury (2005), didefinisikan sebagai tingkat kemampuan kantor akuntan dalam memahami bisnis klien. Audit sendiri dalam arti luas didefinisikan sebagai suatu proses sistimatis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasil kepada para pengguna yang berkepentingan (Taylor dan Glezen, 1991). Dari pendapat tersebut dapat digambarkan hal-hal penting sebagai berikut :

- a. Audit harus dilakukan secara sistimatis. Hal ini berarti audit tersebut dilakukan secara terencana dan menggunakan orang-orang yang

- memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai sebagai auditor, serta mampu menjadi independensi dalam sikap mental baik dalam penampilan maupun dalam tindakan.
- b. Harus memperoleh bukti-bukti untuk dapat membuktikan hasil investigasi serta mengevaluasi apakah informasi keuangan telah sesuai dengan kriteria dan standar akuntansi yang telah ditetapkan.
 - c. Menetapkan tingkat kesesuaian atau kewajaran antara asersi-asersi dalam laporan keuangan klien dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Kriteria atau standar yang dimaksud adalah sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - d. Menyampaikan hasil-hasil auditannya kepada para pengguna yang berkepentingan (misalkan kepada managerial ownership), sehingga para pengguna yang berkepentingan dengan informasi tersebut akan dapat membuat keputusan ekonomi.

2.6.1 Peningkatan Kualitas Audit

Jasa akuntan publik memberikan manfaat dalam memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, lebih dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan laporan keuangan yang belum diaudit. Hal ini mendorong perusahaan serta instrumen di dalamnya, baik kreditor dan investor dalam peningkatan keandalan laporan keuangan sebagai output dari kinerja akuntan publik. Peningkatan keandalan laporan keuangan menuntut pada peningkatan kualitas akuntan publik dalam hal ini adalah auditor. Semakin tinggi

kualitas yang dimiliki auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan maka semakin bermutu dan handal laporan keuangan yang dibuatnya.

De Angelo dalam Ida (1986:186) mengatakan bahwa kualitas audit tergantung oleh 2 faktor yaitu (1) kemampuan auditor untuk menguji akun-akun dan mengidentifikasi kesalahan melalui kompetensi teknisnya, dan (2) objektivitas melalui independensinya. Menurut Libby dan Frederick (1990) pengalaman yang dimiliki auditor akan mempengaruhi kualitas auditnya, mereka menemukan bahwa semakin banyak pengalaman auditor semakin dapat menghasilkan berbagai dugaan dalam menjelaskan temuan audit. Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja auditor (Bonner, 1990; Ashton, 1991; Choo dan Trotman, 1991; Tubbs, 1992; Abdolmohammadi dan Wright, 1987).

Salah satu bentuk dari perilaku fungsional auditor adalah bekerja dengan lebih keras dan menggunakan waktu dengan benar (Cook & Kelley, 1991; Outley & Pierce, 1996b). Beberapa tipe perilaku fungsional telah diidentifikasi dalam praktek audit. Misalnya personel audit berinisiatif meminta tambahan waktu kepada atasan (Outley & Pierce, 1996b) dan menggunakan teknik audit yang lebih efisien (Coram et al, 2003).

2.6.2 Penurunan Kualitas Audit

Keberadaan perilaku penurunan kualitas audit (Reduced audit quality) dalam literatur auditing merupakan bukti bahwa implementasi prosedur audit yang sesuai dengan program audit tidak selalu dilaksanakan auditor. Perilaku RAQ didefinisikan “setiap tindakan yang dilakukan auditor selama pelaksanaan

prosedur audit yang mengurangi efektivitas bukti-bukti audit yang dikumpulkan (Kelley dan Margheim, 1990; Pierce dan Sweeney, 2004). Perilaku RAQ merupakan masalah yang serius karena mengurangi kualitas audit secara langsung (Otley dan Pierce, 1996a; McNair, 1991). Penelitian-penelitian yang lebih awal tentang perilaku RAQ terutama difokuskan pada satu tipe perilaku yang dianggap paling serius yaitu penghentian prematur atas prosedur audit (premature sign-off).

Penghentian prematur atas prosedur audit merupakan tindakan yang dilakukan auditor dengan tidak melaksanakan atau mengabaikan satu atau beberapa prosedur audit yang disyaratkan, namun auditor mendokumentasikan semua prosedur audit telah diselesaikan secara lengkap (Alderman dan Deitrick 1982; Raghunathan, 1991). Sedangkan Otley dan Pierce (1996b) dan Pierce dan Sweeney (2004) mengidentifikasi berbagai bentuk tindakan lainnya yang dilakukan auditor dalam pelaksanaan program audit yang berpotensi mereduksi kualitas audit. Tindakan-tindakan tersebut meliputi:

1. Review yang dangkal terhadap dokumen klien.
2. Pengujian terhadap sebagian item sampel.
3. Tidak menginvestigasi lebih lanjut item yang diragukan.
4. Penerimaan atas penjelasan klien yang lemah.
5. Tidak meneliti prinsip akuntansi yang diterapkan klien
6. Pengurangan pekerjaan audit pada level yang lebih rendah dari yang disyaratkan dalam program audit.

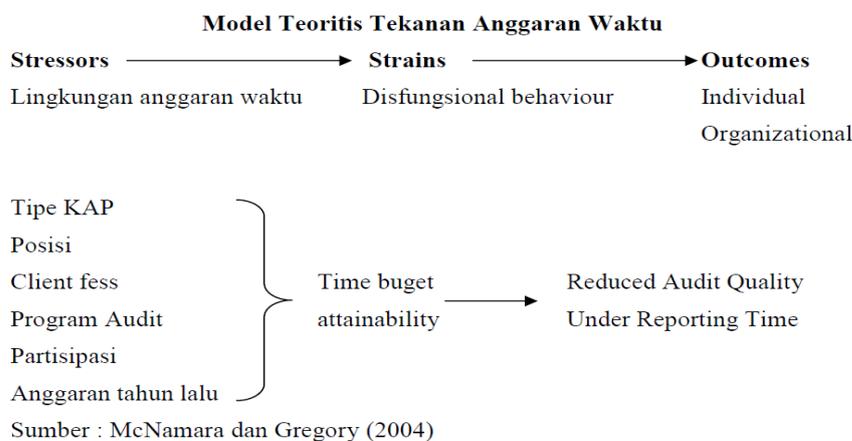
Tindakan-tindakan tersebut bersama-sama dengan premature Sign-Off merupakan tindakan yang secara langsung mengurangi kualitas audit karena

auditor secara sengaja mereduksi efektivitas bukti-bukti audit yang dikumpulkan. Dengan demikian bukti audit yang dikumpulkan tidak memadai secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini akan menyebabkan kemungkinan auditor membuat judgment dan opini yang salah akan semakin tinggi (Coram et al., 2003). Malone dan Robert (1996) mengemukakan meskipun terdapat mekanisme internal dan eksternal dalam mengendalikan mutu pekerjaan audit, auditor kadang-kadang mengkompromikan kualitas audit karena mereka memilih untuk tidak melaksanakan seluruh tahapan program audit secara cermat dan seksama.

Di dalam penelitian De Zoort dan Lord (1997), menyebutkan, ketika menghadapi tekanan anggaran waktu, auditor akan memberikan respon dengan dua cara, yaitu; fungsional dan disfungsional. Tipe fungsional adalah perilaku auditor untuk bekerja lebih baik dan menggunakan waktu sebaik-baiknya, hal ini sesuai juga dengan pendapat yang dikemukakan oleh Glover (1997), yang mengatakan bahwa anggaran waktu diidentifikasi sebagai suatu potensi untuk meningkatkan penilaian audit (audit judgement) dengan mendorong auditor lebih memilih informasi yang relevan dan menghindari penilaian yang tidak relevan. Sementara itu tipe disfungsional perilaku auditor yang dikemukakan oleh Rhode (1978), mengatakan bahwa tekanan anggaran waktu berpotensi menyebabkan perilaku RAQ.

Model teoritis dari tekanan anggaran waktu (Gambar 2.3) yang dikemukakan oleh McNamara dan Gregory (2004), menunjukkan berbagai variasi penyebab tekanan (stressor) sehubungan dengan tekanan anggaran waktu yang sering dijumpai dalam lingkungan audit.

Gambar 2.3



McNamara dan Gregory (2004), menyebutkan bahwa stressors adalah kondisi yang mendahului (antecedent condition) dan strains adalah salah satu respon yang diberikan terhadap kondisi tersebut yang akan berpengaruh terhadap hasil secara individu maupun organisasi. Salah satu kondisi tersebut adalah tekanan anggaran waktu yang dapat menyebabkan perilaku RAQ dan Under Reporting Time.

2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait dengan pengujian substantif antara lain sebagai berikut :

Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil
Eke Wydia Hastuti (2005)	Peranan Risiko Pengendalian Terhadap Lingkup Pengujian Substantif atas saldo Persediaan (studi kasus pada KAP KBS)	Untuk mengetahui bagaimana peranan risiko pengendalian terhadap lingkup pengujian substantif atas saldo persediaan	Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif.	Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses pengukuran resiko pengendalian yang dilakukan



	di bandung).	berdasarkan pandangan auditor atas risiko pengendalian yang ada pada PT X yang diaudit oleh KAP KBS.		oleh KAP Drs. Gunawan Sudrajat telah efektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik.
Erwandy, Budhi (2005)	Penggunaan Pengukuran Resiko Pengendalian Dalam penetapan Lingkup Pengujian Substantif atas Saldo Persediaan	Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan mempelajari prosedur bagaimana efektifitas pengukuran resiko pengendalian pada KAP Drs. Gunawan Sudrajat	Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dan bersifat kualitatif.	Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses pengukuran resiko pengendalian yang dilakukan oleh KAP Drs. Gunawan Sudrajat telah efektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini dilakukan pada beberapa KAP yang berlokasi di Malang. Penelitian ini menggunakan metode analisis dekriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui proses wawancara mendalam (Indepth-interview), observasi, dan analisa dokumen. Teknik analisa data dilakukan dengan menggunakan metode reduksi dan memungkinkan untuk

mendapatkan temuan baru karena yang nantinya akan dijadikan perhatian oleh penulis dalam mengambil kesimpulan.

2.8 Kerangka Pemikiran

